



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN 2021**



**KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jatilawang, Februari 2022

CAMAT JATILAWANG,

DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
Pembina TK I
NIP.19700426 199203 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Jatilawang tahun 2018-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Jatilawang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.394.886.576,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.296.723.905,00 atau mencapai 95,90 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari Kecamatan Jatilawang indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud Dan Tujuan	7
C. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama (Iku)	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
D. Rencana Anggaran Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	18
C. Akuntabilitas Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	344

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Jatilawang Tahun 2021.....	10
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Tahun 2021	10
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2021	11
Tabel 4 Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021.....	12
Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	13
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	14
Tabel 7 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020	16
Tabel 9 Rincian Sasaran Dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 Dan 2021	19
Tabel 11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik .	21
Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat	22
Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.....	23
Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	25
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	26
Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	27
Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.....	28
Tabel 18 Anggaran Dan Realisasi Belanja Kecamatan Jatilawang.	29
Tabel 19 Anggaran Dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatilawang	30
Tabel 20 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2021	31
Tabel 21 Tingkat Efisiensi Kinerja Dan Anggaran.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2021. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Jatilawang

1. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas seluas 4815,92 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1.643 ha atau sekitar 34 % dari wilayah Kecamatan Jatilawang sedangkan sisanya sebesar 3.172 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 1.642 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Jatilawang terdapat 11 desa.

2. Kondisi Demografi

Kecamatan Jatilawang dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 23.223 jiwa, dengan penduduk sebesar 72.350 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 36.661 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 35.689 jiwa.

3. Pegawai Pada Kecamatan Jatilawang

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Jatilawang pada tahun 2021 adalah sebanyak 27 orang dengan rincian sebagai berikut:

- PNS : 17 Orang
- Tenaga kontrak : 10 Orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

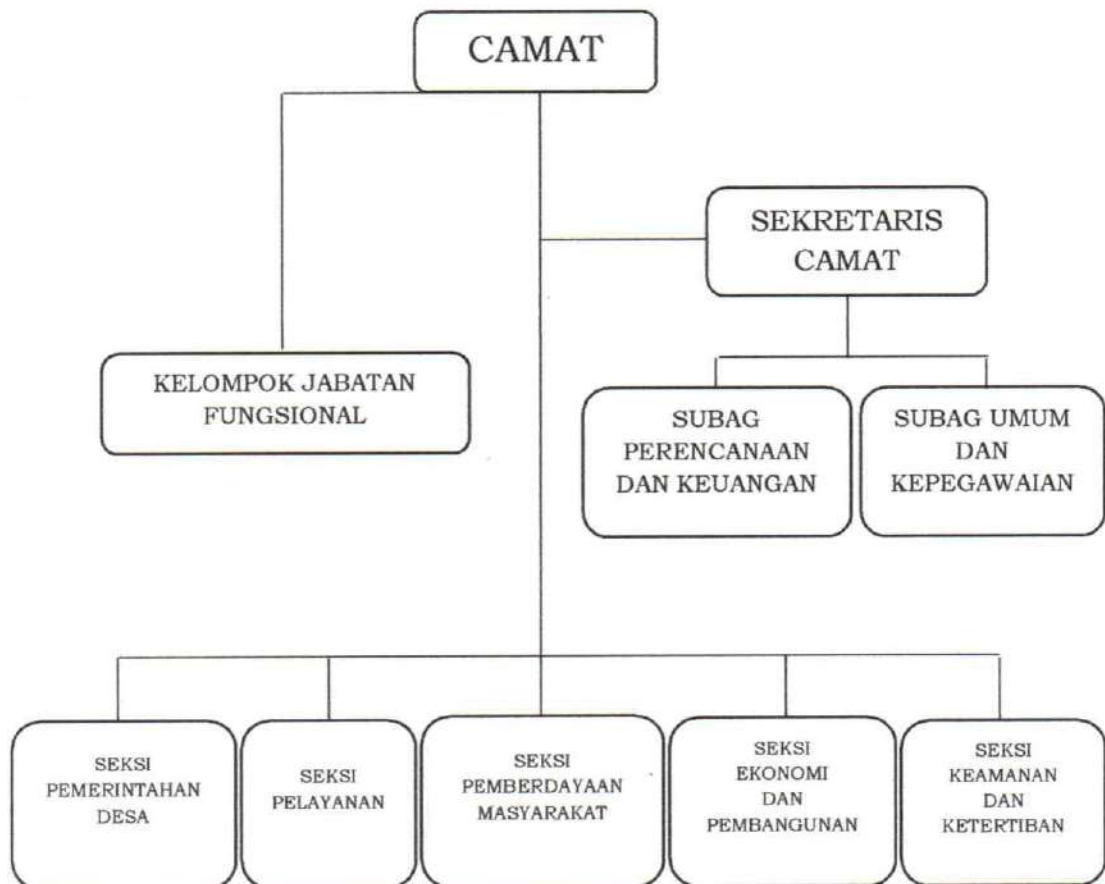
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN JATILAWANG



Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan

pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

5. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
8. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pembinaan serta pengawasan pengelolaan dana desa yang terfasilitasi, mempersiapkan dan memfasilitasi pembuatan proposal, dan memonitoring serta evaluasi perencanaan pembangunan desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Jatilawang tahun 2021 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Jatilawang sesuai dengan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 adalah **"MEWUJUDKAN BANYUMAS SEBAGAI BAROMETER PELAYANAN PUBLIK DENGAN MEMBANGUN SISTEM INTEGRITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL, BERSIH PARTISIPATIF, INOVASI DAN BERMARTABAT"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan banyumas sebagai barometer pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatifitas berbasis sumber daya lokal;
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan;
6. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan; dan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatilawang Tahun 2021

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Peningkatan peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
3	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat Waktu	100%
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatilawang pada tahun 2021 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Jatilawang setelah perubahan sebesar Rp 2.394.886.576,00 dengan komposisi anggaran belanja operasi Rp2.364.437.276,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp 30.449.300,00. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Program	Anggaran	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	16.300.000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	42.331.140
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	9.600.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp	36.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.290.655.436
Jumlah Anggaran		Rp	2.394.886.576

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Jatilawang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2021.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk

memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	-	84	84	100
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan Baik	%	100	100	100
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100

5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100
7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100

Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	7	10
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	2	3	4	5	6			7
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan Baik	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Jatilawang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2021

setelah dilaksanakan revidi atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9 Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR
1	2	3
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	1 Indikator
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Indikator
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Indikator
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Indikator
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Indikator
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Indikator
7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan 2021

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	-	83	83	100	84	84	100

2	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	80	80	100	100	100	100
6	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

10	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
----	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 11 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	%	83	83	100	84	84	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya manusia yang sangat meningkat terutama dalam hal penguasaan Teknologi informatika,
2. Sarana prasarana yang meningkat.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga kerja PNS untuk membantu tugas pelayanan
2. Kurangnya BinteK dan Kursus tentang tugas-tugas yang mendukung pelayanan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk membantu pelayanan
2. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada untuk mendukung tugas pelayanan

2. Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat" dengan 1 (dua) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang mudah dan dapat mengajukan permohonan dari rumah
2. Pelayanan kependudukan sudah dapat langsung cetak tidak menunggu dari dinas terkait kecuali dalam administrasi tertentu

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Gangguan jaringan internet yang menghambat pelayanan karena berbasis aplikasi
2. Pandemi

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Menyediakan modem cadangan yang dapat digunakan saat ada gangguan
2. Ketersediaan blangko yang memadai

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antar target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 13 Capaian Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sering diadakan pembinaan-pembinaan ke desa-desa tentang administrasi Pemerintahan Desa
2. Kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam peningkatan tertib administrasi Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada di desa masih ada yang tidak menguasai teknologi Informatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa.
2. Anggaran yang ada di kecamatan masih kurang dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi ke desa-desa dan tenaga yang masih kurang.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Kepala Desa agar meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya Perangkat Desa dalam bidang TIK.
2. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk melaksanakan monev administrasi Pemerintahan yang ada dengan di bantu kasi-kasi yang lain.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan" dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antar target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 14 Capaian Kinerja Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya lembaga-Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan , Pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Terjalin Kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran Dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan sehingga untuk kegiatan terbentur dengan anggaran,
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran Lembaga masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertakan dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar lembaga kemasyarakatan untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Program Koordinasi dan Ketertiban Umum” dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antar target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Program Koordinasi dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kekompakan antar forkompincam yang menjadikan situasi aman terkendali
2. Komunikasi yang berjalan dengan lancar

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang susah diatur
2. Personel yang masih kurang

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Kepala Desa mensosialisakn peraturan yang ada
2. Penambahan personel

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa” dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antar target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 16 Capaian Kinerja Sasaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antara Desa dan Kecamatan
2. Melakukan pembinaan terhadap Desa

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat laporan pertanggungjawaban yang kurang lengkap
2. Terlambatnya informasi masuk

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Pengecekan terhadap laporan pertanggungjawaban
2. Pihak pemberi bantuan seperti Banku ada surat resmi agar dapat terawasi

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota" dengan 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 100 % dengan predikat Sangat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antar target dan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 17 Capaian Kinerja Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen Penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu dalam membuat laporan
2. Penyediaan dan pengelolaan administrasi yang mumpuni

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi yang terbatas waktu
2. Kartu kontrol yang belum tersedia

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Pemberian waktu pengisian aplikasi dilakukan saat jam kerja bukan di hari libur
2. Kontrol barang dilakukan saat pembelian guna mengontrol keluar masuknya barang persediaan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jatilawang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jatilawang.

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.364.437.276	2.268.823.905	95.90
2.	Belanja Modal	30.449.300	27.900.000	91.63

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatilawang

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 16.300.000	Rp 15.359.200	94,23
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 42.331.140	Rp 40.025.500	94,55
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.600.000	Rp 8.848.000	92,17
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 36.000.000	Rp 34.245.000	95,13
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.290.655.436	Rp 2.198.246.205	95,97
Jumlah Anggaran		Rp 2.394.886.576	Rp 2.296.723.905	

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Jatilawang tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	1	100%	-	-
2	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	1	100%	-	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	Rp 15.359.200	94.23
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100%	Rp 40.025.500	94,55
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	Rp 8.848.000	92.17
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100%	Rp 34.245.000	95,13

7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	100%	Rp2.198.246.205	95.97
---	---	---	------	-----------------	-------

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jatilawang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya dengan capaian minimal 92.17 % dan maksimal 95,97 % %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 21 Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	PRESENTAS E REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	1	100%	-	-

2	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	1	100%	-	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	94.23	5,57
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100%	94,55	5,45
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	92.17	7,83
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100%	95,13	4,87
7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	100%	95.97	4,03

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2021 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan

pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I - IV TAHUN 2021
KECAMATAN JATILAWANG

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI				REALISASI S.D. (9)	CAPAIAN (%) (10)	PERMASALAHAN (11)	SOLUSI (12)
				I (5)	II (6)	III (7)	IV (8)				
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84%	84	84	84	84		100		
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat Waktu	100%	100	100	100	100		100		
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%	100	100	100	100		100		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	100	100	100	100		100		

5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Keteraturan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan keteraturan umum	100%	100	100	100	100	100	100	100			
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100	100	100	100	100	100			
7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100%	100	100	100	100	100	100	100			

11	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD	6 orang	6	6	6	6	6	6	100		
12	Tersedianya Mebel Kantor	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	5 Unit	0	0	0	0	0	0	0	Tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran	
13	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang tersedia	3 Unit	0	0	0	0	0	0	0	Tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran	
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang Dipelihara	10 Unit	4	8	9	10			100		
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	3	6	5	6			70		

16	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang Dipelihara	5 Unit	5	5	5	5	5	100		
17	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Jenis	1	1	1	1	1	100		
18	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	3 Jenis	3	3	3	3	3	100		
19	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	3, Jenis	3	3	3	3	3	100		
20	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang Tersedia	12 Bulan	3	3	3	3	3	100		
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan yang tersedia	11623 Lembar	432	4465	3125	371	72,21		Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pandemi	

	Jumlah cetakan yang tersediaJumlah Cetakan yang tersedia	8 Buah	2	4	5	8		100		
22	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	2 Kali	0	0	1		50	Refocusing karena adanya pandemi yang tidak memperbolehkan perjalanan dinas luar	
23	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Surat Kabar, telepon, Internet, Listrik, dan Air yang Dikelola	12 Bulan	3	3	3		100		
24	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dilaksanakan	27 Jenis	0	0	0		0	Kegiatan tidak dilaksanakan (kirab hari jadi Banyumas)	
25	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	10 Orang	10	10	10		100		

laksananya san nerintahan yang kait dengan venangan lain ig dilimpahkan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Telah Menyampaikan Laporan PBB yang Terbayar	11 Desa	11	11	11	11	11	100		
laksananya silitasi ngelolaan angan Desa 1 ndayagunaan at Desa	Frekuensi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	2 Kali	1	0	1	0	0	100		
laksananya mingkatan tisipasi syarakat dalam um syawarah rencanaan mbangunan di sa	Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	330 Orang	0	0	330	0	0	100		

29	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unsur yang Bersinergi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	5 Unsur	5	5	5	5	5	100		
30	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang Terlayani	14100 Orang	4340	4800	3142	3479		111,78		
31	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Frekuensi Rapat-rapat terkait Pemberdayaan Masyarakat	24 Kali	6	6	6	6		100		

32	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	24 Kegiatan	6	6	6	6	100	
----	---	--	-------------	---	---	---	---	-----	--

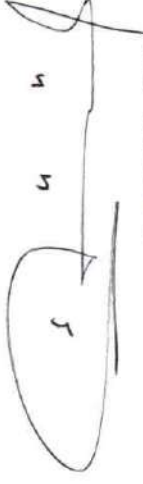
Jatilawang, 25 Januari 2022

SEKCAM JATILAWANG



WALOYO, S.Sos.
NIP 19680807 199201 1 001

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



DARSINI, S.H.
NIP 19720630 200801 2 005



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP 19700426 199203 1 005

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATILAWANG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84	84	100
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100
7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	100	100

	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 16.300.000	Rp 15.359.200	94,23%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 42.331.140	Rp 40.025.500	94,55%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.600.000	Rp 8.848.000	92,17%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 36.000.000	Rp 34.245.000	95,13%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.290.655.436	Rp 2.198.246.205	95,97%
Jumlah Anggaran		Rp 2.394.886.576	Rp 2.296.723.905	95,90%

Jatilawang, 25 Januari 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANG
KECAMATAN JATILAWANG
DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP. 19700426 199203 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
CAMAT JATILAWANG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	84	84	100
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	100	100
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100	100	100

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 16.300.000	Rp 15.359.200	94,23%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 42.331.140	Rp 40.025.500	94,55%
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.600.000	Rp 8.848.000	92,17%

4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp	36.000.000	Rp	34.245.000	95,13%
	Jumlah Anggaran	Rp	104.231.140	Rp	98.477.700	

Jatilawang, 25 Januari 2022



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP.19700426 199203 1 005

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
SEKCAM KECAMATAN JATILAWANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	100	100	100
		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.290.655.436	Rp 2.198.246.205	95,97%
Jumlah Anggaran		Rp 2.290.655.436	Rp 2.198.246.205	

Jatilawang, 25 Januari 2022

SEKCAM JATILAWANG



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP 19700426 199203 1 005

WALOYO, S.Sos.
NIP 19680807 199201 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN JATILAWANG

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDDES	11 Desa	11 Desa	100
2	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

No	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 36.000.000	Rp 34.245.000	95%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp 7.500.000	Rp 6.977.100	93%
Jumlah Anggaran		Rp 43.500.000	Rp 41.222.100	



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP 19700426 199203 1 005

Jatilawang, 25 Januari 2022

KASI PEMERINTAHAN DESA

SAHID, S.E.
NIP 19640420 199103 1 011

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JATILAWANG**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Frekuensi Rapat-rapat terkait Pemberdayaan Masyarakat	24 Kali		
2	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	11 Desa	11 Desa	100

No	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp 20.195.400	Rp 18.978.000	

2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	14.335.740	Rp	13.692.400	96%
Jumlah Anggaran		Rp	34.531.140	Rp	32.670.400	

Jatilawang, 25 Januari 2022

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

[Signature]

ELLINA INDRIASTUTI, S.H., M.H.
NIP 19741225 199803 2 007



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP 19700426 199203 1 005

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASI EKONOMI PEMBANGUNAN
KECAMATAN JATILAWANG**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang aktif dalam kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Desa	11 Desa	100

No	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	7.355.100	94%
	Jumlah Anggaran	Rp	7.355.100	

Jatilawang, 25 Januari 2022

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN



[Handwritten Signature]
WARSITO, S.H.
NIP 19650505 198912 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PELAYANAN
KECAMATAN JATILAWANG

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan di Kecamatan	2 Jenis	2 Jenis	100

No	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Nonperizinan	Rp 8.800.000	Rp 8.382.100	95%
Jumlah Anggaran		Rp 8.800.000	8.382.100	

Jatilawang, 25 Januari 2022

KASI PELAYANAN



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
 NIP 19700426 199203 1 005

SUGENG/SUDIBYO, S.I.P.
 NIP 19640705 198603 1 024

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN JATILAWANG

NO	SASARAN SUB KEIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

No	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.600.000	Rp 8.848.000	92%
	Jumlah Anggaran	Rp 9.600.000	8.848.000	

Jatilawang, 25 Januari 2022

GAMAT JATILAWANG



DWI MULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP. 19700426 199203 1 005

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

WAHYU WIDODO
NIP. 19651025 198603 1 017

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN JATILAWANG

NIO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjanganya	16 orang	16 orang	100
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD	6 orang	6 orang	100
3	Tersedianya Mebel Kantor	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	5 Unit	0 Unit	0
4	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang tersedia	3 Unit	3 Unit	0
5	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	5 Unit	5 Unit	100
6	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang Dipelihara	10 Unit	8 Unit	80
7	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Unit	70
8	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	100

9	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	100
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	4 Jenis	4 Jenis	100
11	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	100
12	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100
13	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang tersedia	11623 lembar	9298 lembar	80
		Jumlah Cetak yang tersedia	8 Buah	8 Buah	100
14	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	2 Kali	1 Kali	50
15	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Surat Kabar, telepon, Internet, Listrik, dan Air yang Dikelola	12 Bulan	12 Bulan	100
16	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dilaksanakan	27 Jenis	0 Jenis	0
17	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	10 Orang	10 Orang	100

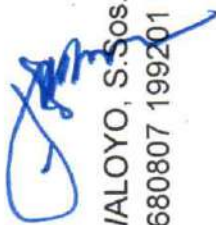
No	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.763.216.226	Rp 1.754.138.146	DAU

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	32.195.000	Rp	30.930.000	APBD
3	Pengadaan Mebel	Rp	-	Rp	-	APBD
4	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Rp	2.030.000	Rp	-	APBD
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	28.419.300	Rp	27.900.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	58.600.000	Rp	44.176.627	APBD
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	20.000.000	Rp	11.985.000	APBD
8	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	-	Rp	-	APBD
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp	5.802.000	Rp	3.766.500	APBD
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp	33.419.543	Rp	11.971.500	APBD
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	9.400.000	Rp	4.350.500	APBD
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	29.799.800	Rp	22.980.000	APBD
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	5.286.900	Rp	2.518.100	APBD
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	19.490.000	Rp	17.890.000	APBD

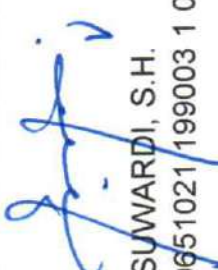
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	39.602.107	Rp	26.839.092	APBD
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	-	Rp	-	APBD
17	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Rp	241.276.560	Rp	237.664.740	APBD
Jumlah Anggaran		Rp	2.288.537.436	Rp	2.197.110.205	

Jatilawang, 25 Januari 2022

PIHAK PERTAMA


WALOYO, S.Sos.
NIP 19680807 199201 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SUWARDI, S.H.
NIP 19651021 199003 1 008


Mengetahui,
CAMAT JATILAWANG
KECAMATAN
JATILAWANG
DWMULYATNO, S.Pd., M.Kes.
NIP 19700426 199203 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN JATILAWANG

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

No	Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.118.000	Rp 1.136.000	54%
	Jumlah Anggaran	Rp 2.118.000	Rp 1.136.000	

SEKCAM JATILAWANG


WALOYO, S.Sos.
NIP 19680807 199201 1 001

Jatilawang, 25 Januari 2022

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


DARSINI, S.H.
NIP 19720630 200801 2 005

